

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata pemerintahan di Indonesia memasuki era baru mulai 1 Januari 2001, yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menjadikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah semakin besar, dengan harapan, daerah semakin mandiri dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan.

Menurut Bappenas (1999) pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Sedangkan pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan

sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan.

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memperlihatkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2007 s.d. 2013 rata-rata mengalami pertumbuhan positif, kecuali kabupaten yang terjadi pemekaran wilayah mengalami pertumbuhan negatif.

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam masalah *financial*. Meskipun demikian pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke pemerintah

daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Perkembangan kontribusi DAU terhadap APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 berfluktuasi dengan kecenderungan semakin menurun.

Keterbatasan anggaran yang bersumber dari dana pemerintah pusat untuk memacu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan intensifikasi penggalan potensi dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perkembangan kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang terbesar terdapat pada Kota Bandar Lampung yaitu 10,99%, sedangkan yang terkecil terdapat pada Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu 1,05%.

Untuk penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Peningkatan PAD akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita.

Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah melalui alokasi sumber-sumber pendanaan yang tercermin pada alokasi belanjanya. Belanja modal, yang diharapkan dapat memacu perkembangan pembangunan ekonomi, nampaknya masih menunjukkan porsi yang masih kecil, walaupun ada indikasi kenaikan setiap tahun. Jenis belanja modal di era desentralisasi seharusnya mempunyai porsi yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya dan paling besar dibandingkan dengan jenis belanja lainnya. Sebab jenis belanja modal ini adalah jenis belanja yang bersifat jangka panjang dan produktif yang digunakan pemerintah untuk membiayai penyediaan barang publik dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rata-rata kontribusi belanja modal terhadap APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang terbesar terdapat pada Kabupaten Mesuji yaitu 38,71%, sedangkan yang terkecil terdapat pada Kabupaten Lampung Tengah yaitu 12,89% .

Alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Halim dan Abdullah, 2006:19). Berkaitan dengan pelayanan publik,

alokasi belanja modal merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Semakin banyak belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian karena belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini mencoba untuk menganalisis “PAD, DAU dan Belanja Modal Serta Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian ini, maka perumusan masalah penelitian adalah pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memacu pembangunan daerah ke arah yang lebih baik melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja sesuai potensi daerah masing-masing. Dana transfer dari pemerintah pusat berupa DAU dan dana yang bersumber dari pemerintah daerah melalui potensi Pendapatan Asli Daerah akan menambah uang yang beredar dalam masyarakat. DAU dan PAD ditampung pada rekening kas daerah baik di bank umum maupun di bank pembangunan daerah. Sepanjang dana tersebut belum digunakan dan masih tersimpan di bank, maka dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman modal kepada pihak swasta maupun masyarakat, yang akan menggerakkan perekonomian daerah.

DAU dan PAD digunakan untuk mengalokasikan belanja modal. Dimana belanja modal akan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah karena belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah PAD, DAU dan belanja modal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung?
2. Apakah PAD berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung?
3. Apakah DAU berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung?
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ingin diteliti, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU dan belanja modal secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

2. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
3. Untuk menganalisis DAU terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
4. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pengambil keputusan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Universitas Lampung.
3. Bagi peneliti sendiri sebagai acuan dalam pengembangan ilmu serta melatih berfikir secara kritis dalam memecahkan masalah.

1.6. Kerangka Pemikiran

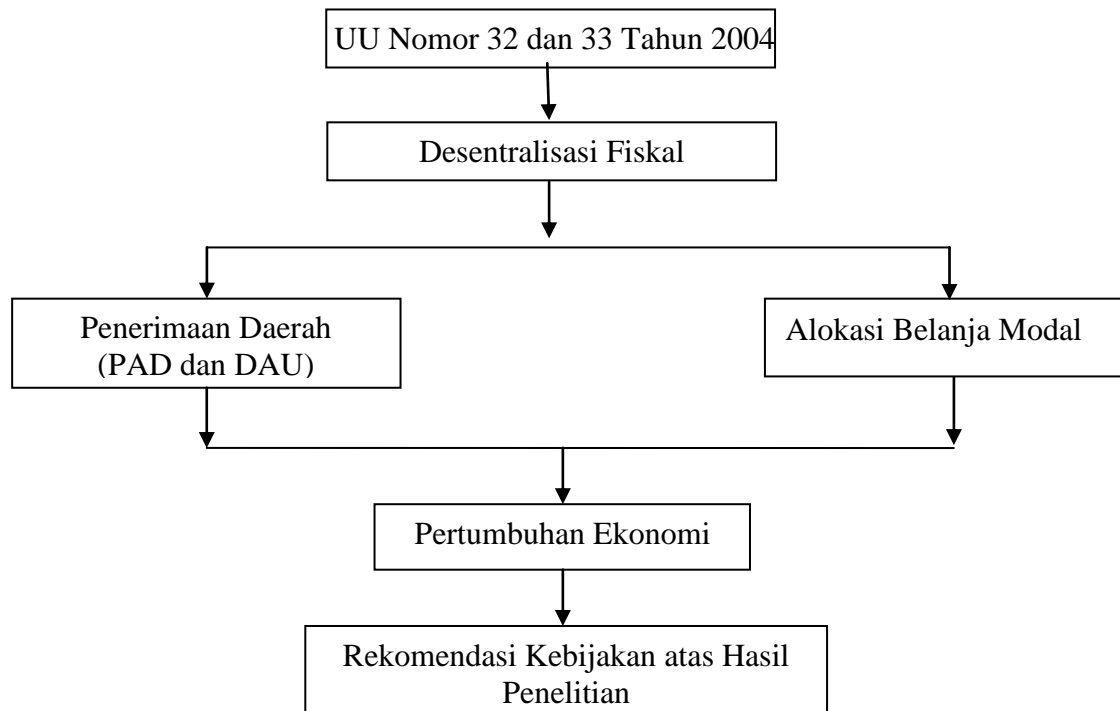
Berdasarkan penelitian terdahulu, dimodifikasi dengan lokasi penelitian yang berbeda dan rentang waktu yang lebih panjang. Variabel yang digunakan yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal sebagai variabel X1, X2, dan X3 akan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Y.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah sendiri yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini bisa terjadi karena dengan penerimaan PAD yang semakin tinggi, daerah semakin bisa memenuhi kebutuhan pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik sehingga produktifitas masyarakat dan investor meningkat yang selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. DAU memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena, sesuai dengan prinsip desentralisasi, tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Pengalokasian DAU kepada daerah sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Pusat berdasarkan kriteria tertentu.

Alokasi belanja modal merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Semakin banyak belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian karena belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Adapun yang menjadi Kerangka Pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



1.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu dapat diformulasi hipotesis sebagai berikut:

H_1 : PAD, DAU dan Belanja Modal pada tahun sebelumnya berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung

H_2 : PAD pada tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung

H₃ : DAU pada tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung

H₄ : Belanja Modal pada tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung